

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perang Irak yang terjadi pada tahun 2003, melibatkan negara-negara besar Amerika Serikat yang juga dibantu dengan pasukan sekutu seperti Inggris, Australia, dan Polandia yang ikut serta dalam kampanye AS untuk berperang melawan Irak. Dalam invasi tersebut Amerika Serikat tidak hanya dibantu oleh negara-negara sekutu saja, namun juga dibantu oleh para kontraktor militer privat. Pemerintah Amerika Serikat pada awalnya memperkirakan perang terhadap Irak tidak akan memakan waktu lama seperti pernyataan menteri pertahanan Donald Rumsfeld pada tahun 2002 saat masa awal sebelum perang, menurutnya perang terhadap Irak dan Afghanistan akan selesai, paling cepat dalam kurun waktu beberapa bulan (Esterbrook, 2002, p. 1), namun perkiraan tersebut salah karena perang menjadi berkepanjangan. Sebab-sebab konflik yang menjadi awal mula invasi AS di Irak seringkali dikaitkan dengan upaya AS untuk menghentikan rezim Saddam Hussein dan membasmi terorisme sampai ke akar-akarnya pasca insiden serangan 11 September 2001.<sup>1</sup>

Penyebab invasi Irak tahun 2003 tidak hanya dikaitkan dengan insiden 11 September tetapi juga disertai faktor lain yang menjadi fokus utama AS yaitu kekuasaan rezim Saddam. Saat Irak berada dibawah kekuasaan rezim Saddam Husein, Irak dicurigai memiliki senjata pemusnah massal (Weapons of Mass Destruction)<sup>2</sup>. Secara spesifik senjata tersebut berkaitan dengan bahan kimiawi dan nuklir. Senjata-senjata tersebut dicurigai oleh pemerintah AS terutama oleh pemerintahan Bush, anggota kabinetnya, dan para pejabat besar dari sektor pertahanan AS di Pentagon. Pada saat pasukan dari AS serta aliansi dimajukan, senjata tersebut tidak pernah ditemukan dalam beberapa waktu pertempuran hingga perang berakhir. Penyelidikan mengenai lokasi senjata kimiawi tersebut dilakukan oleh United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission (UNMOVIC) dari PBB, sebuah badan khusus yang dibentuk untuk menyelidiki dan mengkonfirmasi benar ada atau tidaknya

---

<sup>1</sup> War on terror atau perang terhadap terorisme merupakan kampanye militer yang dilakukan utamanya oleh negara besar seperti AS, Inggris, dan sebagainya. Kampanye militer ini sangat menentang tindak terorisme dan dibuat untuk mengatasinya.

<sup>2</sup> Isu mengenai keberadaan WMD seringkali menjadi perdebatan mengenai realitasnya apakah benar-benar ada atau tidak. Apabila benar ada maka invasi AS ke Irak akan terlihat lebih condong kedalam alasan intervensi perdamaian dan memiliki efek sebaliknya apabila senjata tersebut pada akhir perang tidak ditemukan.

senjata tersebut di Irak.<sup>3</sup> Selama masa permusuhan AS-Irak aktif, badan penyidik tersebut secara kolektif mencari lebih dari 230 lokasi yang dicurigai (Cleminson, 2003, p. 1).

Dalam perang Irak AS mengerahkan tentara bayaran atau PMC (Private Military Company)<sup>4</sup> dalam invasi Irak dan juga menempatkan mereka di Irak pasca perang pada tahun 2004. Sebelum AS menginvasi Irak pada Maret 2003, pemerintahan Presiden George W. Bush memperkirakan akan menelan biaya 50-60 miliar dollar untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein demi membebaskan rakyat Irak. Tidak lama kemudian perkiraan biaya perang tersebut meningkat, perang di Irak diperkirakan akan menelan biaya lebih dari 823,2 miliar dollar apabila menggunakan militer resmi AS secara penuh (tanpa melibatkan PMC). Untuk mengendalikan biaya tinggi yang dihasilkan dari data perkiraan pemakaian anggaran tersebut, AS menggunakan sebagian anggaran militer untuk menyewa pasukan dari kontraktor swasta PMCs pada puncak perang (Boyle, 2013, p. 1). Pasukan privat atau kontraktor militer privat ini dijadikan sebagai salah satu solusi untuk membantu menyelesaikan perang (MCFATE, 2016, p. 1) dikarenakan berbagai keuntungan yang didapat mulai dari penghematan biaya perang dan tambahan kekuatan yang efektif. Misalnya pasca berakhirnya perang Irak sejak Juni 2004, kelompok PMC seperti Blackwater,<sup>5</sup> telah dibayar lebih dari 320 juta dollar dari 1 triliun dollar budget anggaran perang untuk melindungi pejabat AS di zona konflik dan beberapa pejabat asing (Bennet, 2007, p. 1). Hal tersebut membuktikan sejauh apa efisiensi penggunaan PMC dalam menghemat penggunaan anggaran militer dan menghindari pengeluaran yang lebih (mengerahkan pasukan resmi AS yang lebih mahal biayanya). Tidak semua negara menjustifikasikan penggunaan PMC, selain itu AS sendiri tidak ikut meratifikasi pelarangan penggunaan PMC dalam The United Nations Mercenary Convention dimana 35 negara sepakat untuk menentang segala bentuk rekrutmen, penggunaan, pendanaan, dan pelatihan tentara bayaran.<sup>6</sup> Oleh karena itu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan AS yang menggunakan PMC karena mereka sendiri tidak meratifikasi perjanjian tersebut, namun hal tersebut membuktikan kurangnya regulasi yang secara sah dapat mengikat penggunaan PMC dalam konflik bersenjata.

---

<sup>3</sup> Berdasarkan kesepakatan United Nations Security Council Resolution 1284. Tahun 1999.

<sup>4</sup> PMC merupakan sebuah perusahaan privat yang bergerak dalam bidang keamanan, militer, dan berbagai hal yang berkaitan dengan penanganan agensi militer.

<sup>5</sup> Blackwater adalah perusahaan militer privat AS, dan sekarang dikenal dengan nama Academi.

<sup>6</sup> Berdasarkan Resolusi PBB no. A/RES/44/34, 4 Desember tahun 1989.

AS merupakan negara yang memiliki militer yang cukup kuat dalam berbagai bidang hal tersebut dapat terlihat dari pembagian kekuasaan militer yang melengkapi berbagai bagian kekuatan militer AS, misalnya Departemen Pertahanan AS (United States Department of Defense atau D.O.D) yang mengatur pengumpulan kekuatan pasukan AS untuk bersiap menghadapi perang. Tidak lupa AS juga memiliki badan khusus yaitu Central Intelligence Agencies (CIA) dan National Security Services (NSA) sebagai badan spesialis intelejen AS, baik departemen pertahanan maupun badan intelejen khusus semua badan tersebut memiliki peran kuat sebagai kekuatan militer (Alex Mintz K. D., 2010, p. 7). Amerika dalam beberapa perang terlihat sebagai negara yang mendominasi perang, hal tersebut dapat dibuktikan ketika runtuhnya Uni Soviet karena kekalahannya dalam perang dingin dan kemenangan mutlak AS dalam Perang Teluk I di Kuwait, dengan demikian tidak dapat disangkal bahwa AS memiliki potensi untuk menjadi negara adidaya (Tony Judt, 2005, p. 61) dan akan menjadi lebih kuat apabila melibatkan tentara privat seperti PMC. Tetapi menurut Stanger (Allison Stanger, 2006, p. 12), dalam artikelnya “Private Military Corporations: Benefits and Costs of Outsourcing Security” terdapat berbagai risiko dari penggunaan jasa PMC yaitu tuntutan pertanggungjawaban (*Accountability*) baik dari publik maupun negara yang tidak menyetujui penggunaan PMC. Kemudian penggunaan PMC berdasarkan data dari penelitian Christa Moessgard yang berjudul “Private military and security companies – from mercenaries to intelligence providers” menunjukkan bahwa terdapat sekitar 90.339 personel kontraktor yang dikontrak oleh departemen pertahanan AS di Irak maupun Afghanistan (Moesgaard, 2013, p. 13), artinya tidak hanya di Irak penggunaan PMC dengan jumlah besar oleh AS juga terjadi di negara lain.

Dari berbagai sumber buku dan jurnal yang dijelaskan diatas telah membuktikan bahwa jumlah besar keterlibatan PMC dalam konflik bersenjata sangatlah mengkhawatirkan. Artinya penggunaan PMC menimbulkan pertanyaan kunci yang akan menjadi urgensi penelitian ini yaitu apa saja determinan-determinan yang menyebabkan AS menggunakan PMC dalam perang Irak. Penulis akan memfokuskan pada penggunaan pendekatan determinan kebijakan luar negeri sebagai pisau analisis dengan beberapa pertimbangan yaitu analisa akan terbagi dalam beberapa kategori determinan yaitu determinan psikologis, internasional, dan domestik. Berdasarkan penjabaran tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu “Analisis Determinan Amerika Serikat Dalam Penggunaan

Private Military Company Pada Perang Irak Tahun 2003”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam mengenai determinan yang menentukan keputusan AS untuk memerangi Irak sekaligus penggunaan PMC didalamnya dan memberikan pemahaman bagaimana suatu kebijakan luar negeri dipertimbangkan kemudian diputuskan dalam hubungan internasional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan kunci dari topik penelitian yang diangkat yaitu: Apa saja determinan kebijakan luar negeri AS yang berpengaruh dalam penggunaan Private Military Company pada perang Irak Tahun 2003?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apa saja bentuk keterlibatan PMC di Irak dan identifikasi tugas yang diberikan kepada kelompok-kelompok pasukan privat tersebut.
2. Menganalisis determinan-determinan kebijakan luar negeri yang mempengaruhi keputusan AS untuk menggunakan PMC.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Secara akademis, penelitian ini dapat berkontribusi untuk menambah ilmu pengetahuan dalam studi Hubungan Internasional. Penelitian ini dapat memberikan sumbangasih dalam analisa kebijakan luar negeri dan menawarkan cara pandang alternatif terhadap keputusan suatu negara yang melibatkan aktor non-pemerintah dalam konflik bersenjata antar-negara lewat determinan-determinan kebijakan luar negeri.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat berkontribusi sebagai peta jalan (*road map*) untuk membantu menambah pemahaman kepada para peneliti yang berusaha menganalisis determinan-determinan dalam kebijakan yang akan diputuskan oleh suatu negara dan tidak lupa untuk menganalisa keterlibatan aktor pihak ketiga non-negara seperti PMC dalam

konflik bersenjata. Manfaat lain adalah, penelitian ini dapat memberikan tambahan pemahaman dalam diskusi yang menggunakan pendekatan determinan kebijakan luar negeri dan upaya mengaplikasikannya dalam studi kasus internasional khususnya mengenai pembuatan kebijakan luar negeri.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Keputusan kebijakan luar negeri dibentuk oleh banyak faktor dan banyak pengaruh yang berperan dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Kerangka pemikiran analisis determinan kebijakan luar negeri dapat membantu memahami apa saja yang berpengaruh dalam pembentukan kebijakan tersebut. Artinya determinan kebijakan luar negeri menilai bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi dan membentuk pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, tidak lupa analisa pada aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri tersebut (Alex Mintz K. D., 2010, p. 97). Menurut Mintz (Alex Mintz K. D., 2010, p. 4), untuk menganalisa secara jelas suatu kebijakan luar negeri atau proses pembuatan kebijakan tersebut dapat dilakukan dari berbagai arah penelitian. Mulai dari pertimbangan mengenai jenis keputusan, tingkat analisis dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri (individu, kelompok, koalisi), proses dan dinamika yang mengarahkan pada pengambilan keputusan (aktor internasional, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan sebagainya). Namun hal terpenting dari analisa kebijakan luar negeri adalah keberadaan faktor determinan.

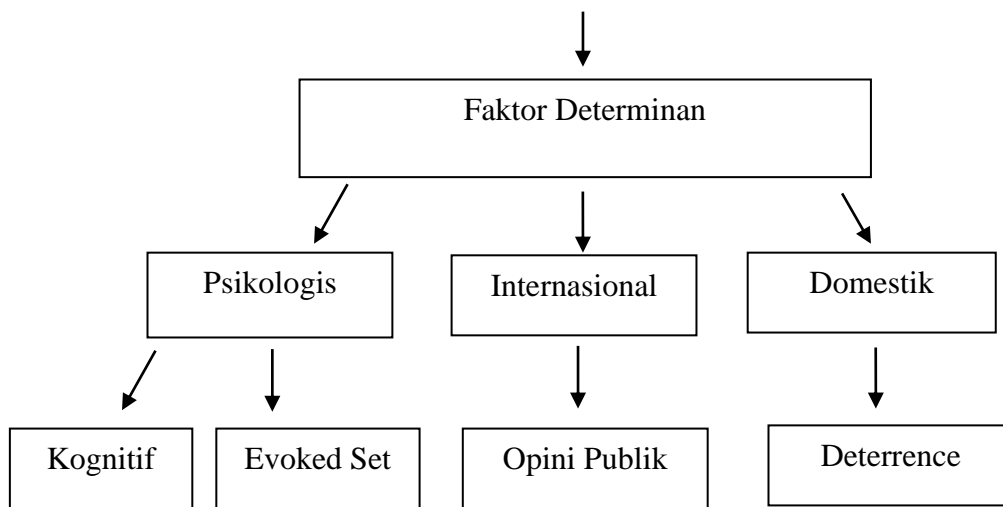
Faktor determinan merupakan penghubung yang berguna untuk mengidentifikasi pertimbangan para aktor pembuat keputusan. Berbagai hal yang berpengaruh sebagai faktor penentu atau determinan mengenai keputusan kebijakan luar negeri antara lain adalah, faktor psikologis, faktor pengaruh internasional, dan faktor pengaruh domestik. Berikut akan dijelaskan definisi singkat dari determinan-determinan tersebut untuk memberi pemahaman awal. Determinan internasional menyangkut wujud kebijakan negara sebagai respon internasional misalnya kebijakan pencegah (*deterrence policy*), kemudian determinan domestik menyangkut faktor internal dalam kebijakan luar negeri suatu negara seperti opini publik misalnya (Alex Mintz K. D., 2010, p. 121-129). Selanjutnya penjelasan lebih dalam mengenai determinan psikologis akan dijelaskan secara terpisah. Hal tersebut karena, determinan psikologis perlu dijelaskan secara khusus karena memiliki ruang lingkup analisa yang berbeda dengan determinan domestik dan internasional.

Penjelasan mengenai determinan psikologis diperlukan pendalaman yang lebih dibanding determinan domestik dan internasional, hal tersebut dikarenakan determinan psikologis mengupas berbagai bidang analisa lewat beberapa faktor pikiran kognitif aktor pembuat keputusan. Faktor tersebut berhubungan dengan konsistensi kognitif (*Cognitive consistency*) atau (*pre-existing beliefs*) dari aktor politik yang bertanggung jawab dalam pembuatan keputusan kebijakan luar negeri. Konsistensi kognitif merupakan pemahaman tentang bagaimana persepsi mempengaruhi pengambilan keputusan. Konsistensi kognitif berarti pembuat keputusan (*decision makers*) meremehkan atau menghiraukan informasi tertentu yang tidak konsisten dengan gambar sebelumnya (*prior images*) dan kepercayaan sebelumnya (*prior beliefs*). Atau terlalu memperhatikan informasi yang konsisten menyertai gambar dan kepercayaan tersebut, sehingga menghiraukan bukti maupun data yang ada. Dengan kata lain, masuknya informasi diproses sesuai dengan ekspektasi mengenai "gambar yang sudah ada sebelumnya" (Alex Mintz K. D., 2010, p. 98). Para pemimpin (*Leaders*) adalah aktor utama sebagai bagian dari faktor determinan konsistensi kognitif pembuatan keputusan. Aktor-aktor lain atau para pengikutnya memiliki berbagai tujuan (*goals*) dan kepentingan (*interest*). Informasi yang membentuk kognisi pimpinan dapat dipengaruhi oleh birokrasi, partai, pandangan dunia (*worldview*), pemimpin kelompok, dan para ahli tertentu. Pengaruh tersebut dapat menempatkan hambatan yang signifikan tentang kebebasan bertindak untuk para pemimpin dalam pengambilan keputusan (Alex Mintz, 2016, p. 16).

Pikiran kognitif dan persepsi aktor pembuat keputusan juga dapat dipengaruhi oleh sejarah, suatu peristiwa, dan bagaimana informasi tersebut terdengar olehnya. Dengan kata lain seorang aktor pembuat keputusan dapat belajar dari suatu peristiwa dan peristiwa tersebut diproses sebagai pengaruh untuk pertimbangan keputusannya. Menurut Jervis (Jervis, 1976, p. 203) sumber faktor determinan dari persepsi terhadap pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh "kekhawatiran langsung" (*evoked set*) yang dimiliki dalam pikiran aktor pembuat keputusan. Setiap aktor memiliki evoked set yang berbeda-beda atau bahkan terkadang sama. Dengan kata lain, bagaimana aktor tertentu memperhatikan suatu hal yang diingat atau dipikirkan secara khusus dapat mempengaruhi bagaimana informasi tersebut dipersepsikan. Perlu diperhatikan juga terdapat tiga poin utama tentang bagaimana pembuat keputusan menyerap atau mengekstrak informasi yang dapat membentuk persepsinya. Pertama, aktor pembuat keputusan akan memproses suatu informasi dengan mempelajari atau

mengumpulkan informasi dari suatu peristiwa terlebih dahulu. Kedua, memperhatikan peristiwa mana yang paling berpengaruh dalam pemberian informasi kepada para pembuat keputusan (yaitu jenis peristiwa yang memiliki dampak terbesar). Ketiga, jenis pelajaran atau informasi umum seperti apa yang biasanya dihasilkan (Jervis, 1976, p. 218).

Determinan kebijakan luar negeri mengumpulkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan tersebut kemudian menganalisa seperti apa pengaruh yang diberikan masing-masing determinan tersebut. Kategori determinan-determinan yang ada memisahkan satu faktor pengaruh dengan yang lainnya serta memiliki fokus analisa yang berbeda. Misalnya, determinan psikologis efektif untuk menganalisa aktor pembuat keputusan, domestik efektif untuk menganalisa internal dalam negara, dan internasional efektif untuk menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh dalam kebijakan luar negeri. Untuk memudahkan pengertian akhir dari determinan-determinan tersebut yaitu psikologis, domestik, dan internasional dapat dilihat dalam rangkaian analisa sebagai berikut:



**Gambar 1.1** Rangkaian akhir pengaruh determinan kebijakan luar negeri dibuat oleh penulis berdasarkan analisa faktor determinan Alex Mintz.

Dapat disimpulkan terdapat tiga faktor determinan penting yang dapat digunakan untuk menganalisa suatu kebijakan luar negeri yaitu determinan psikologis, internasional, dan domestik. Penelitian dengan pendekatan determinan dipilih penulis karena determinan kebijakan luar negeri dianggap sebagai pendekatan yang berguna untuk menjelaskan

fenomena kasus yang diteliti mengenai pertimbangan dari pengaruh keputusan kebijakan luar negeri tersebut. Dengan kata lain tiga faktor determinan tersebut akan digunakan untuk menganalisa keputusan AS ketika memutuskan untuk berperang terhadap Irak, serta keputusan AS untuk menggunakan PMC dalam konflik tersebut. Pertimbangan mengenai pemilihan teori determinan dikarenakan studi kasus yang diteliti melibatkan berbagai aktor dalam ranah yang berbeda, yaitu domestik (kelompok pemerintah berpengaruh dalam AS), dan internasional (negara-negara yang terlibat dalam konflik) seperti AS dengan Irak yang dapat dianalisa secara mendalam lewat tiga faktor determinan tersebut. Dalam teori determinan kebijakan luar negeri, sangat penting untuk mengidentifikasi keberadaan faktor-faktor determinan untuk menganalisa pertimbangan para aktor pembuat keputusan dalam memutuskan suatu kebijakan luar negeri. Faktor determinan tersebut dapat ditemukan dari berbagai bidang seperti psikologis, pengaruh domestik, dan internasional.

## **1.6 Argumen penelitian**

Penelitian ini berargumen bahwa terdapat determinan-determinan kebijakan luar negeri yang memberikan pengaruh terhadap pertimbangan para aktor pembuat keputusan (*decision makers*) AS ketika memutuskan untuk melibatkan Private Military Company (PMC) dalam konflik Irak tahun 2003.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Definisi Konseptual**

#### **1.7.1.1 Konsep dari Private Military Company – Kontraktor Militer Privat**

Istilah dari PMC (*Private Military Company*) atau PSC (*Private Security Company*) dapat diartikan sebagai sebuah perusahaan korporat yang mengfokuskan privatisasi jasa keamanan sebagai layanan utamanya dan menyediakan berbagai jenis layanan dalam sektor keamanan serta militer (Moesgaard, 2013, p. 13). Keterlibatan perusahaan ini berada dalam lingkup penyedia jasa militer (kombatan) dan intelejen (non-kombatan) yang bisa digunakan dalam situasi tertentu untuk menyelesaikan masalah keamanan negara, perang, dan konflik bersenjata. Regulasi PMC berada pada wilayah abu-abu peraturan internasional, karena keberadaan PMC sendiri dalam konflik bersenjata seringkali tidak diakui sebagai bagian dari suatu negara yang memiliki kontrak denganya. Berbagai saran maupun usulan tentang



pentingnya pembuatan regulasi baru dalam peraturan internasional yang mampu mengikat PMC dalam peraturan internasional secara sah dan tepat sangat diperlukan. Misalnya menurut Bryden (Alan Bryden, 2006, p. 10), terdapat sebuah syarat yang harus dipenuhi untuk memberlakukan regulasi (peraturan) yang sah dalam sistem internasional yang menyangkut pengendalian penggunaan PMC dalam sistem internasional. Syarat tersebut adalah diperlukannya kerja sama dari berbagai aktor internasional mulai dari kooperasi berbagai negara hingga campur tangan dari organisasi internasional yang mampu membantu pembentukan regulasi dalam bidang peraturan nasional regional dan internasional terkait keberadaan PMC.

### **1.7.1.2 Konsep dari Contracting State – Negara Kontraktor**

Contracting state atau Negara Kontraktor merupakan negara yang menjadi sumber utama penyewaan tentara bayaran. Penggunaan PMC oleh pemerintah nasional menunjukkan perubahan mendasar dalam caranya kekuatan militer diciptakan dan diposisikan. Negara yang menggunakan PMC dalam pelaksanaan suatu kebijakan maupun keputusan politik luar negeri dapat mempengaruhi perbedaan kekuatan antar negara dalam konflik bersenjata. Mereka yang menyewa dan menggunakan jasa tersebut disebut negara kontraktor. Singkatnya dengan menggunakan PMC maka suatu negara dapat mempengaruhi keseimbangan pembagian kekuasaan (*balance of power*) dalam sistem internasional (Allison Stanger, 2006, p. 8). Dapat disimpulkan, PMC adalah penyedia jasa dan bagaimana cara menggunakan jasa tersebut tergantung pada penggunanya (negara kontraktor).

## **1.7.2 Definisi Operasional**

### **1.7.2.1 Private Military Company**

Mengacu pada gagasan Moesgaard yang sudah dijelaskan, PMC beroperasi lewat hubungan kontrak usaha mereka yang terikat dengan negara kontraktor. Untuk memahami relasi tersebut kita perlu mengambil contoh salah satu negara kontraktor, Amerika misalnya. Sebagian besar PMC yang disewa oleh Amerika dapat beroperasi sebagai konsultan dan pendukung kekuatan militer dalam pertempuran. Mereka membentuk pasukan yang mengkhususkan diri dalam konsultasi strategis, pengumpulan intelijen dan analisis, pelatihan militer dan taktis, teknologi informasi, dan teknis, bantuan logistik, dan operasional (Moesgaard, 2013, p. 13). Dengan menyewa PMCs negara kontraktor akan memperoleh

beberapa keuntungan dan risiko. Tugas yang diberikan berbeda-beda tergantung pada keputusan negara kontraktor bagaimana mereka akan menggunakan jasa tersebut.

### 1.7.2.2 Contracting State

Konsep operasional dari Contracting State mengacu pada kontrak negara kontraktor dan bagaimana penggunaan jasa PMC oleh negara tersebut. Inilah yang menjadi faktor pembeda antara PMC dengan pasukan bayaran individual (*mercenary*), meskipun keduanya sama-sama menyediakan jasa militer, PMC beroperasi sebagai perusahaan korporat yang resmi sementara “*mercenary*” bekerja sebagai individu. Untuk lebih memahami lebih dalam mengenai bagaimana negara menggunakan jasa tersebut bisa kita lihat dalam beberapa keuntungan dan risiko yang menyertai penggunaan PMC. Keuntungan yang bisa didapat negara kontraktor adalah korban dari pertempuran tidak akan sepenuhnya melemahkan pasukan militer asli negara kontraktor, memotong anggaran biaya militer, dan kekuatan yang disewa terjamin kualitasnya, hal tersebut dikarenakan pasukan PMC masih termasuk dalam wilayah abu-abu dalam hukum internasional karena tidak tergolong secara resmi dalam pasukan perang negara pengguna (Moshe Schwartz, 2008, p. 15).

Keuntungan-keuntungan dari penggunaan PMC yang telah disebutkan diatas merupakan keuntungan nyata yang didapat AS pada saat invasi Irak dan Afghanistan dilakukan. Penggunaan PMC dalam konflik bersenjata juga memiliki risiko terhadap negara pengguna maupun sistem internasional secara keseluruhan. Adapun risiko yang disebabkan oleh PMC dalam penggunaannya seperti, kurangnya transparansi membuat negara lain ingin mengikuti langkah penyewaan PMCs, adanya tuntutan pertanggungjawaban (Accountability) yang bisa dituntut pada negara kontraktor serta perusahaan, penodaan nama baik negara, dan terkadang dapat memicu insiden yang tidak diperkirakan akan terjadi oleh negara kontraktor yang disebabkan oleh pasukan bayaran yang disewa seperti insiden penembakan Nisour Square di Irak (Tavernise, 2007, p. 1).<sup>7</sup> Keberadaan PMC telah menimbulkan kekhawatiran dalam beberapa dekade terakhir. Kekhawatiran tersebut bisa dicontohkan dalam studi kasus penggunaan jasanya dalam pertempuran tertentu. Yang ditakutkan adalah potensi penggunaan yang tidak sah atau monopoli yang mungkin dilakukan oleh negara pengguna jasa tersebut. Negara kontraktor adalah kendali yang menentukan bagaimana PMC beroperasi.

---

<sup>7</sup> Insiden ini menewaskan 17 masyarakat sipil Irak dan memperluas jarak hubungan antara Irak dengan AS

Kesimpulannya, bagaimana tentara bayaran bergerak tergantung pada orientasi dan tujuan negara kontraktor.

### **1.7.3 Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah tipe eksplanatif. Yakni tipe penelitian yang berusaha menjelaskan secara rinci atau gambaran mengenai suatu fenomena, dan menyediakan sumber sesuai data aslinya. Setelah disediakan mengenai gambaran maupun penjelasan rinci mengenai suatu fenomena tersebut maka penelitian ini berusaha menjelaskan dinamika kasus sekaligus memecahkan masalah penelitian yang ada dengan menggunakan teori yang diangkat. Bisa disimpulkan penelitian ini memberikan gambaran detail suatu kasus (Determinan AS ketika mengerahkan PMC dalam invasi Irak), kemudian berusaha menemukan jawaban mengenai kasus tersebut dengan menggunakan teori tentang analisa determinan kebijakan luar negeri.

### **1.7.4 Jangkauan Penelitian**

Dalam penelitian ini sumber data dibatasi oleh ruang lingkup peristiwa invasi Irak. Mengenai lingkup batasan waktu dilakukan dengan memastikan bahwa data penelitian yang dikumpulkan berisi informasi akurat tentang peristiwa invasi Irak yang terjadi pada tahun 2003 hingga beberapa tahun setelah perang selesai untuk mengamati keterlibatan PMC dalam penempatan mereka di Irak pasca perang berakhir dan tidak lebih dari itu. Dalam lingkup data tersebut, fokus utama dari penelitian ini berada pada bidang sebab-sebab invasi dan pengerahan PMC dalam invasi.

### **1.7.5 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Peneliti mengumpulkan data-data yang bersumber dari arsip, buku-buku, artikel, jurnal, majalah, koran, dan artikel-artikel online. Untuk menjaga kualitas penelitian tidak semua sumber data yang berkaitan dengan penelitian digunakan, peneliti mengedepankan prioritas data dari sumber yang relevan dan terpercaya. Data yang diambil kemudian dikaji untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang masalah dan bidang yang akan diteliti, dalam konteks ini data yang dikumpulkan harus berkaitan dengan peristiwa invasi AS di Irak tahun 2003.

### **1.7.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif berkaitan dengan proses persiapan dan pengaturan data (Creswell, 2007, p. 188). Berikut adalah teknik atau strategi analisis data yang digunakan:

- 1) Pertama, mendiskripsikan data yang dikumpulkan. Artinya mendiskripsikan studi kasus yang diteliti dan konteks didalamnya berdasarkan data-data yang diambil. Membaca data maupun teks secara terperinci tentang invasi Irak dan peran PMC didalamnya.
- 2) Kedua, mengklasifikasikan data yang relevan, tidak semua data atau informasi yang dikumpulkan akan digunakan. Pentingnya untuk menyimpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus utama penelitian.
- 3) Ketiga, interpretasi akhir data yang dikumpulkan. Maksudnya adalah mengartikan data yang dikumpulkan dalam berbagai arti. Dalam menginterpretasi data, dugaan dan anggapan peneliti penting dalam mengamati dengan jelas teks atau data yang dikumpulkan sehingga tidak menerima informasi secara mentah.

